

IMPLEMENTASI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TERHADAP MUTU SEKOLAH DI SMP NEGERI 1 MARGAHAYU KABUPATEN BANDUNG

Dini Riani¹, Saiful Almujab²

^{1,2}Pend. Ekonomi FKIP Universitas Pasundan

¹dini.turmudzi@gmail.com, ²saifulalmujab@unpas.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of BOS funds and how it affects the quality of schools in SMP Negeri 1 Margahayu Kab. Bandung. The research approach used is a quantitative approach with survey research methods. The results showed that the use of school operational assistance funds at SMP Negeri 1 Margahayu Kab. Bandung with a good category, and its effect on the quality of schools is in the medium category, namely 35.0%, while 65.0% is influenced by other factors. The BOS funds that is directed at the goals of the education curriculum has a positive impact on the student learning process and in efforts to improve the quality of the school.

Keywords: School operational assistance, quality of the school

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penggunaan Dana BOS dan bagaimana pengaruhnya pada mutu sekolah di SMP Negeri 1 Margahayu Kab. Bandung. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian survey. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana bantuan operasional sekolah di SMP Negeri 1 Margahayu Kab. Bandung dengan kategori baik, dan pengaruhnya terhadap mutu sekolah berada dalam kategori sedang yaitu sebesar 35.0%, sedangkan 65.0% dipengaruhi faktor lain. Penggunaan dana bantuan operasional sekolah yang terarah pada sasaran tujuan kurikulum pendidikan memberikan dampak positif terhadap proses pembelajaran siswa dan dalam upaya peningkatan mutu sekolah tersebut.

Kata Kunci: Dana BOS, Mutu Sekolah

A. Pendahuluan

Dalam rangka pencapaian tujuan Nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui proses pendidikan dalam Undang-Undang Sisdiknas 2002/2003 menyebutkan tujuan pendidikan Nasional adalah Menurut UU no. 20 tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, dan pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan

kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”.

Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dilakukan melalui PMB mulai dari TK, SD, SLTP, SLTA dalam jalur pendidikan formal dan informal. Kebijakan pembangunan pendidikan diprioritaskan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar yang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan dasar. Kurang stabilnya perekonomian di beberapa tahun terakhir secara tidak langsung menghambat upaya penuntasan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun karena penduduk miskin akan semakin sulit memenuhi kebutuhan biaya pendidikan.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut maka pemerintah wajib memberikan

layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs serta satuan pendidikan yang sederajat).

Menurut data Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, “Salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun diukur dengan Angka Partisipasi Murni (APM). Pada tahun 20018/2019, APM tingkat SMP sebesar 75,57 %. Dengan demikian, pada saat ini masih ada sekitar 3 juta anak usia 13-15 tahun yang masih belum mendapatkan layanan pendidikan dasar. Selain masalah pencapaian target APM, permasalahan lain yang dihadapi adalah masih rendahnya mutu pendidikan yang antara lain mencakup masalah tenaga kependidikan, fasilitas, manajemen, proses pembelajaran dan prestasi siswa.

Dengan adanya pengurangan subsidi bahan bakar minyak, amanat undang-undang dan upaya percepatan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu, Pemerintah melanjutkan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB negeri/swasta dan Pesantren Salafiyah serta sekolah keagamaan non islam setara SD dan

SMP yang menyelenggarakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

Program BOS ditunjukkan untuk meningkatkan fasilitas pendidikan. Misalnya, pembangunan gedung sekolah dan beberapa sarana penunjang lainnya. Fasilitas pendidikan, diakui atau tidak adalah merupakan sarana penting untuk menunjang kualitas pendidikan. Sarana infrastruktur pendidikan yang baik akan memudahkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman orang atas suatu bidang pembelajaran. Memang sangat riskan, menginginkan proses belajar-mengajar berjalan dengan baik namun tidak ditunjang oleh sarana infrastruktur yang baik pula.

Penyaluran BOS yang pengaturannya diserahkan kepada masing-masing daerah diupayakan agar lebih mengena. Untuk mengawasi penyaluran BOS, mulai pen-dataan hingga penyalurannya, telah disiapkan beberapa tim pengawas agar benar-benar mengena dan efisien.

Sebelum disalurkan, setiap sekolah perlu menyerahkan kebutuhan sarana dan prasarannya yang masih kurang dan benar-benar perlu. Hal itu dimaksudkan agar nantinya dana BOS tidak digunakan untuk kebutuhan yang sebenarnya kurang

perlu. Sebab selama ini, kita sering menghamburkan uang negara untuk kebutuhan yang sebenarnya kurang penting. Jadi terkesan (walaupun benar) kita adalah bangsa yang senang menghabiskan anggaran. Jika kebutuhan sebuah sekolah akan sarana fisik seperti gedung telah terpenuhi, BOS bisa dialihkan untuk menambah buku-buku bacaan di perpustakaan untuk peningkatan budaya membaca dan pengetahuan siswa. Selama ini, pembangunan sering diartikan sebagai sebuah usaha pembuatan sarana fisik semata. Karena itu, yang terjadi adalah pembangunan fisik berjalan baik, namun pembangunan mental dan cara berpikir masyarakat cenderung berjalan di tempat. Dengan demikian, usaha memerdekakan masyarakat dari kebodohan selalu gagal.

Buktinya, kita masih sering diperdayai oleh bangsa asing dalam banyak hal. Kebijakan pembangunan pendidikan ditujukan untuk memberikan peningkatan akses rakyat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini

kurang dapat menjangkau layanan pendidikan. Kenaikan harga BBM dikawatirkan akan menurunkan daya beli rakyat miskin. Hal tersebut lebih lanjut dapat menghambat upaya penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, karenan penduduk miskin akan semakin sulit memenuhi biaya pendidikan. Oleh sebab itu program PKPS-BBM bidang pendidikan perlu dilanjutkan.

Niat baik pemerintah dan DPR untuk membantu orang tua murid tentu mesti disambut positif. Soalnya, walau berfungsi menunjang proses belajar-mengajar, buku pelajaran justru dianggap sumber masalah bagi orang tua murid. Dalam buku panduan penggunaan dana BOS, Program BOS bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun.

Program pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dimaksudkan sebagai bantuan kepada sekolah/madrasah/salafiyah dalam rangka membebaskan iuran siswa namun sekolah tetap dapat mempertahankan mutu pelayanan

pendidikan kepada masyarakat. Pemberian program BKM dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat keluarga kurang/tidak mampu akan layanan pendidikan jenjang Sekolah Lanjutan Atas dan yang sederajat (SLA dan sederajat).

Melalui program BOS, Pemerintah Pusat memberikan bantuan dana "*blockgrant*" kepada sekolah. Sekolah dapat menggunakan dana tersebut untuk keperluan operasional sekolah, khususnya biaya operasional non personil sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam buku petunjuk pelaksanaan program. Besarnya dana yang di terima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan alokasi sebesar Rp. 800.000,- per tahun per siswa tingkat SD dan Rp. 1.000.000,- per tahun per siswa tingkat SMP. Alokasi per siswa tersebut ditetapkan berdasarkan perhitungan biaya pendidikan. Dana untuk semester pertama TA 2018/2019 diserahkan sekaligus dan ditransfer langsung ke rekening masing-masing sekolah. Pengelolaan dana dilakukan dan menjadi tanggungjawab kepala sekolah dan guru/ bendahara yang ditunjuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja sekolah (RAPBS) yang telah disetujui oleh komite sekolah.

Pada dasarnya semua sekolah negeri dan swasta tingkat SD dan SMP yang meliputi SD/MI/ SDLB, SMP/ MTs/ SMPLB dan Salafiyah serta sekolah keagamaan *non*-Islam Setingkat SD dan SMP yang menyelenggarakan program Wajib Diknas (Wajib Belajar Pendidikan Dasar) berhak memperoleh BOS. Sekolah yang menerima BOS diharuskan untuk mengikuti semua aturan yang ditetapkan oleh pengelola program, baik mengenai cara pengelolaan penggunaan, pertanggungjawaban dana BOS yang diterima, maupun monitoring dan evaluasi. Sekolah yang mampu secara ekonomi dan memiliki pendapatan yang lebih besar dari dana BOS berhak untuk menolak BOS, apabila disetujui oleh orang tua siswa dan komite sekolah. Untuk sekolah penerima BOS ditetapkan aturan sebagai berikut:

- Sekolah yang jumlah penerimaan dari peserta didik (sebelum BOS) lebih kecil dari BOS harus membebaskan siswa dari semua bentuk pungutan/sumbangan/iuran yang digunakan untuk membiayai pengeluaran yang dapat dibiayai dari dana BOS. Sekolah juga diminta untuk membantu siswa kurang mampu yang mengalami

kesulitan transportasi dari dan sekolah

- Sekolah yang jumlah penerimaan dari peserta didik (sebelum BOS) lebih dari BOS tetap dapat memungut biaya tambahan, tetapi harus membebaskan iuran sekolah ada siswa miskin, apabila di sekolah tersebut ada siswa miskin. Bila masih ada sisa dana BOS, setelah digunakan untuk memsubsidi siswa miskin, maka sisa dana tersebut dapat digunakan untuk mensubsidi siswa yang lain. Apabila di sekolah tersebut tidak ada siswa miskin, dana BOS dapat digunakan untuk mensubsidi semua siswa sehingga iuran siswa akan berkurang.

Dalam Buku Petunjuk, disebutkan bahwa sekolah yang menolak BOS juga harus membebaskan iuran bagi siswa miskin, tetapi aturan ini tidak ada dalam petunjuk Pelaksanaan. Dana BOS digunakan untuk:

1. Uang formulir pendaftaran
2. Buku pelajaran pokok dan buku penunjang untuk perpustakaan
3. Biaya peningkatan mutu guru (MGMP, MKS, pelatihan, dll)
4. Ujian sekolah, ulangan umum bersama, dan ulangan harian

5. Membeli bahan-bahan habis pakai misalnya buku tulis, kapur tulis, pensil, bahan praktikum
6. Membayar biaya perawatan ringan
7. Membayar daya dan jasa
8. Membayar honorarium guru dan tenaga pendidikan honorer
9. Membiaya kegiatan kesiswaan (remedial, pengayaan, ekstra-kurikuler)
10. Memberi bantuan siswa miskin untuk biaya transportasi
11. Khusus untuk salafiyah dan sekolah keagamaan non-Islam, dana BOS juga diperkenankan untuk biaya asrama/pondokan dan membeli peralatan ibadah.

B. Metode Penelitian

Dalam proses penelitian, suatu metode penelitian sangat diperlukan karena berfungsi untuk mengarahkan penelitian agar mencapai tujuan secara efektif. Dimana penelitian yang efektif yaitu penelitian yang dilaksanakan secara ilmiah, logis, dan sistematis serta dapat dipertanggung jawabkan. Muhiddin Sirat (2006:121) “Metode penelitian adalah suatu cara memilih masalah dan penentuan judul penelitian”.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian survey

dengan tingkat ekplanasi asosiatif kausal. Menurut Sugiono (2008: 55-56) rumusan masalah asosiatif yaitu suatu pernyataan penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Sedangkan hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat adanya variabel independen (variabel yang mempengaruhi dan dependen (dipengaruhi)).

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMPN 1 Margahayu Kab. Bandung sebanyak 280 orang. Sedangkan jumlah sampel yang akan diambil digunakan rumus:

$$n = \frac{N}{1+N(d^2)}$$

Keterangan :

N = Besar populasi

n = Besar sampel

d = Tingkat kepercayaan atau ketepatan yang diinginkan (0.1)

Diketahui populasi sebanyak 280 siswa (N = 280) dimana,

$$n = \frac{280}{1+280(0.1^2)} = n = \frac{280}{3.80}$$

$$n = 73.06 = 73 \text{ (pembulatan)}$$

Maka besarnya sampel minimal yang diambil pada penelitian ini sebanyak 73 orang.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Untuk mengetahui mengapa pemanfaatan dana BOS di SMPN 1 Margahayu Kab. Bandung, analisa dilakukan dengan menggunakan metode terkait masukan (*input*) program, proses (*process*) program sampai hasil (*output*) yang dicapai oleh program itu sendiri.

Dalam proses pemanfaatan dana BOS faktor lain yang tak kalah pentingnya yaitu bagaimana ketersediaan sumber daya yang diperlukan. Masukan program meliputi kualifikasi pendidikan dan pengalaman SDM yang terlibat di dalamnya. Tanpa sumber-sumber daya tersebut proses pelaksanaan tidak akan berjalan secara efektif. Hal ini mudah dimengerti karena proses pelaksanaan program sudah tentu menuntut tersedianya SDM yang cukup baik dalam jumlah maupun kualifikasinya.

Sumber Daya Manusia

Berkaitan dengan ketersediaan sumber daya manusia dengan kualifikasi dan jumlah yang memadai akan sangat menentukan evaluasi pemanfaatan dana. Oleh karena itu, pengelola program pada komponen SDM yaitu memenuhi kualifikasi pendidikan SDM, pernah mengikuti kegiatan sosialisasi dan pelatihan program BOS, memahami tugas dan

tanggung jawab dalam pelaksanaan program sesuai juklak, dan mampu mensosialisasikan kembali kepada masyarakat/orang tua siswa.

Dalam menjalankan program diperlukannya sikap profesionalisme dan kualitas yang cukup baik dari SDM yang diberikan kewenangan, mereka dapat memahami dengan baik, peraturan-peraturan maupun juklak/juknis sebagai dasar pelaksanaan program, mulai dari pemenuhan persyaratan sebagai langkah awal, pengelolaan dana sampai laporan pertanggung jawaban pemanfaatan dana BOS.

Selain itu, mengenai kompetensi guru dari segi kegiatan belajar mengajar, banyak indikator yang dapat dilihat apakah pemanfaatan dana BOS efektif atau tidak. Pertama, faktor tenaga pendidik. Peranan guru sangat menentukan dalam usaha peningkatan mutu pendidikan formal. Untuk itu guru sebagai agen pembelajaran dituntut untuk mampu menyelenggarakan proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Guru mempunyai peranan strategis dalam membentuk karakter dan kecerdasan anak didik dan oleh karena itu perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat.

Seiring dengan UU No 20/2003 dan ketentuan pasal 4 UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa “Guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional”. Untuk dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, guru wajib untuk memiliki syarat tertentu, salah satu diantaranya adalah kompetensi. Salah satu peruntukan resmi program dana BOS adalah untuk pembayaran gaji honorer. Program dana BOS efektif jika menyentuh langsung guru honorer. Hal yang ingin dicapai adalah mampu memecahkan berbagai masalah dalam berbagai kehidupan bermasyarakat. Faktor lain guna memperbaiki pendidikan adalah dengan mendorong para guru agar dapat memperbaiki kualitas proses pembelajaran, juga mendorong peran orang tua untuk ikut membimbing dan memotivasi belajar anak di rumah. Hal yang lebih penting sebagai jangka panjang perlunya pemerintah mendorong untuk meningkatkan penghasilan para orang tua dengan membuka berbagai hal lapangan pekerjaan untuk kesempatan berusaha.

Selain itu, peningkatan penerimaan guru, baik melalui peningkatan honor guru honorer maupun dari

penerimaan tambahan bagi guru tetap dan tidak tetap berkaitan dengan peningkatan kegiatan belajar mengajar. Peningkatan intensitas kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas guru seperti KKG/ MGMP/ pelatihan/ workshop. Namun, perlu dicatat bahwa dampak kegiatan tersebut akan maksimal bila kualitas kegiatan tersebut dapat dijaga.

Berkaitan dengan kegiatan peningkatan sumberdaya manusia di sekolah pada umumnya bersumber dari pembiayaan dana rutin dan dana BOS maupun dana untuk penyelenggaraan pelatihan. Terhadap pelaksanaan pembinaan guru di tingkat sekolah pada umumnya memperoleh dukungan dari dana BOS. Fenomena ini dianggap telah memberikan iklim yang baik terhadap peningkatan guru berbasis sekolah dengan pemanfaatan dana BOS. Peningkatan mutu guru juga selalu dibarengi dengan monitoring guru oleh kepala sekolah secara berkala.

Terkait dengan pendidikan dan pelatihan, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai penanggung jawab dan pelaksana program, kepala sekolah, bendahara, dan guru mendapatkan pelatihan dari pemerintah kota dan pengalaman mereka

didukung oleh pendidikan yang memadai dan kepala sekolah telah menekuni bidangnya selama 13 tahun serta semua guru berpendidikan sarjana. Dengan demikian komponen sumber daya manusia (SDM) pelaksana bantuan operasional sekolah (BOS) pada SMPN 1 Margahayu Kab. Bandung telah memenuhi untuk kualifikasi pendidikan sesuai standar yang ditetapkan.

Dana

Banyaknya permasalahan yang terjadi seputar pelaksanaan program BOS ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program dana BOS ada masalah. Masalahnya adalah dana BOS yang belum dicairkan pada saat dibutuhkan, sedangkan kebutuhan sekolah, yang tugas utamanya adalah melayani kepentingan anak didik, tidak dapat ditunda serta sistem administrasi keuangan dari pemerintah yang ketat. Dana BOS diberikan per triwulan, tetapi kehadirannya tidak pernah tepat pada awal triwulan. Ada kalanya pada bulan kedua, ada kalanya pada bulan ketiga, sehingga pada awal triwulan sekolah belum memperoleh dana operasional sedangkan sekolah harus tetap berjalan.

Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai memungkinkan tercapainya tujuan organisasi dan terjaminnya pelaksanaan program yang efektif dan efisien. Sarana dan prasarana merupakan salah satu komponen yang menjadi salah satu fokus penelitian ini.

Hasil observasi dan wawancara dilapangan menunjukkan bahwa seluruh sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program yang telah ditetapkan telah terpenuhi dan memadai. Sarana prasarana yang ada meliputi ruangan kepala sekolah, ruangan guru, dan ruang tata usaha. Di dalam ruangan tata usaha tersebut tersedia 9 (sembilan) meja kerja, 9 (sembilan) kursi, 4 (empat) komputer, dan 1 (satu) set tempat duduk tamu. Di dalam ruangan kepala sekolah terdapat 1 (set) komputer lengkap dengan printer dan LCD. Namun dalam hal pengadaan sarana dan prasarana tidak seluruhnya didanai oleh program dana BOS.

Pencapaian Proses

Dalam pencapaian proses merujuk dari hasil teori evaluasi program Bruce W Truckman, dilihat kesesuaian antara pelaksanaan program BOS dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam juklak/juknis.

Dalam rangka memberikan panduan terhadap pelaksanaan program bantuan operasional sekolah diatur lebih lanjut berkaitan dengan penggunaan, larangan penggunaan, mekanisme penyaluran sampai monitoring dan evaluasinya.

Pengelola program tingkat pusat telah menerbitkan buku petunjuk pelaksanaan/penggunaan program. Diharapkan dengan buku petunjuk pelaksanaan tersebut seluruh pengelola program dari mulai tingkat pusat sampai tingkat sekolah baik di bawah lingkup Departemen Pendidikan Nasional maupun Departemen Agama, maka dalam melaksanakan program sesuai juklak/juknis dituntut pemahaman yang baik dari SDM yang terlibat. Buku petunjuk pelaksanaan tersebut didistribusikan oleh Tim PKPS Pusat melalui jasa PT. POS Indonesia ke seluruh pelaksana program di semua tingkatan termasuk ke pelaksana program di sekolah.

Dalam petunjuk pelaksanaan penyaluran dana BOS, dana BOS harus merupakan salah satu sumber penerimaan bagi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) di samping dana yang diperoleh dari sumber lain. Penggunaan dana BOS di SMPN 1 Margahayu Kab. Bandung didasarkan atas kesepakatan antara sekolah

dengan komite sekolah. Dana BOS ini nantinya digunakan untuk keperluan biaya telepon, air, dan listrik serta evaluasi penerimaan siswa baru, sehingga diharapkan tidak ada lagi anak-anak usia 7-15 tahun yang tidak bersekolah.

Mengenai pengelolaan dana BOS di SMPN 1 Margahayu Kab. Bandung menurut kepala sekolah pada dasarnya telah berjalan dengan baik. Semua kepala sekolah telah melakukan pengelolaan dana BOS menggunakan juklak yang diterbitkan oleh pemerintah, dan semua kepala sekolah juga memahami isi buku tersebut. Mengenai besar penggunaan dana BOS, informan menyatakan peruntukan dana BOS adalah untuk keperluan administrasi sekolah, membayar guru honor, perawatan dan perbaikan serta melengkapi sarana sekolah. Hal ini telah sesuai dengan buku petunjuk yang telah ditetapkan. Adapun jenis sarana belajar yang paling banyak diperhatikan adalah media pembelajaran yang mencapai dan buku pelajaran.

Pencapaian Hasil (Output)

Peningkatan pencapaian angka kelanjutan siswa SD ke jenjang pendidikan SMP sesuai dengan program wajib belajar pendidikan sembilan tahun yaitu enam tahun di sekolah dasar dan tiga tahun di sekolah menengah pertama. Hasil tanggapan responden mengenai mutu sekolah didapatkan hasil tanggapan yang baik dengan pencapaian rata-rata sebesar 78.60%.

E. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai implementasi dana BOS terhadap mutu sekolah, maka kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penggunaan dana bantuan operasional sekolah di SMP Negeri 1 Margahayu Kab. Bandung dengan kategori baik mencapai angka sebesar 78.63%. Tingginya pencapaian penggunaan bantuan operasional sekolah salah satunya diprioritaskan terhadap sasaran kategori miskin dengan pendapatan orang tua yang rendah untuk meringankan biaya pendidikan.
2. Mutu sekolah di SMP Negeri 1 Margahayu Kab. Bandung dengan kategori baik mencapai angka sebesar 78.60%. Tingginya pen-

capaian mutu sekolah di SMP Negeri 1 Margahayu Kab. Bandung telah diupayakan sekolah dengan baik. Diantaranya mengupayakan perlengkapan kegiatan belajar mengajar untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, menampung minat siswa pada berbagai aktivitas pembelajaran, termasuk meningkatkan kemampuan guru pada berbagai pendidikan dan latihan untuk diaplikasikan pada tindakan kelas.

3. Pengaruh implementasi dana bantuan operasional sekolah terhadap mutu sekolah di SMP Negeri 1 Margahayu Kab. Bandung sebesar 35.0%, sedangkan 65.0% dipengaruhi faktor lain. Penggunaan dana bantuan operasional sekolah yang terarah pada sasaran tujuan kurikulum pendidikan memberikan dampak positif terhadap proses pembelajaran siswa dan dalam upaya peningkatan mutu sekolah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Renika Cipta.
- Fandy Tjiptono. (2006). *Manajemen Pelayanan Jasa*. Yogyakarta; Andi

- Ghozali, Imam. (2005). Analisis Multivariate SPSS. Semarang; Universitas Diponegoro.
- Husein Umar. (2006). Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada
- Nugroho, Bhuono Agung. (2005). Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian Dengan SPSS. Yogyakarta; CV. Andi Offset.
- Santoso B. (2005). Menguasai Statistik di Era Informasi Dengan SPSS 12. Jakarta; PT. Alex Media Komputindo.
- Sugiyono. (2006). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung; Alfabeta.
- .(2008). Metode Penelitian. Bandung; Alfa Beta.
- Sudjana Nana. (2002). Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar. Bandung; Sinar Baru Algensindo Offset.
- Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
- Peraturan Mendiknas Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia
- Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, Tentang Fungsi dan Tujuan Pendidikan. Jakarta.
- Winarno Surakhmad. (2002). Pengantar Penelitian Dasar, Metode, dan Teknik. Bandung; Tarsito.